**PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PADA UNIT PPA SATRESKRIM POLRES
BLITAR)**

Oleh

Eko Budi Sariyono¹, Dian Cahayani², Arum Widiastuti³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

Jl. Menoreh Tengah X No. 22 Sampangan, Kota Semarang 50232 Indonesia

Email: ¹ekobudi76120885@gmail.com, ²diancahaya971@gmail.com,

³arumbsb@unwahas.ac.id

Article History:

Received: 15-12-2023

Revised: 04-01-2024

Accepted: 18-01-2024

Keywords:

Violence, Women And
Children, Criminology

Abstract: All forms of violence in general and acts of violence against women and children are a form of violation of human rights and constitute a crime against human dignity and discrimination. The state is responsible for the protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights guaranteed by laws and regulations. This research discusses the factors causing criminal acts of violence against women and children as well as the handling of criminal acts of violence against women and children by the women and child protection unit of the Blitar Police Criminal Investigation Unit. The type of research used in this writing is empirical juridical research to determine the conditions that occur in the field. The research approach uses a qualitative approach with the legal materials used being primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research show that the factors causing criminal acts of violence against women and children in the Blitar Regency area are legal awareness, patriarchal culture, economic factors and poverty, allegations of infidelity and early marriage factors. From this research it can be explained that the handling efforts were carried out using a non-penal and penal approach and the obstacles experienced were in the form of internal and external obstacles from the police

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya memiliki dua sifat, yakni manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu berarti setiap manusia memiliki perbedaan sifat dan tingkah laku yang khas, yang berasal dari sifat keturunan dari orang tuanya dan juga sifat dari lingkungan dimana ia tinggal. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial berarti setiap manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Sifat manusia sebagai makhluk sosial lainnya yakni secara naluriah, manusia memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi atau berbicara dengan manusia lainnya. Hal ini

merupakan sifat mendasar yang dimiliki oleh manusia.¹

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan suatu perbuatan yang ditentang oleh semua manusia di dunia karena merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat orang lain. Kekerasan dapat berupa penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) beserta perubahannya, Pasal 28 B Ayat (2) menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan pada umumnya maupun tindak kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak adalah suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta perlakuan diskriminasi. Dasar tanggung jawab negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

- (4) *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*
- (5) *Untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*

Rumusan Pasal 28 B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (4) dan (5) UUD NRI 1945 tersebut menegaskan Indonesia menganut prinsip bahwa negara dan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya merupakan perbuatan hukum yang berdimensi kriminal, tetapi juga merupakan penyimpangan perilaku sosial yang perlu segera di atasi oleh pemerintah daerah.

Seiring dengan perkembangan modernisasi saat ini telah meletakkan perempuan dan anak selalu dalam skala prioritas, tetapi tak jarang dijumpai perempuan dan anak selalu dijadikan sebagai alat untuk mencapai sesuatu, di mana terutama anak dieksploitasi secara tidak wajar oleh keluarga dan lingkungannya. Eksploitasi dan kekerasan fisik banyak terjadi pada keluarga yang tingkat ekonominya berada di bawah garis kemiskinan, mereka dipaksa untuk melakukan suatu pekerjaan yang melebihi batas kewajaran seperti menjadikan anak sebagai pengamen jalanan maupun anak sering dijadikan sebagai obyek pelampiasan bagi keluarga yang disharmonis.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang menjadi perhatian banyak pihak, ini merupakan masalah publik dan pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia secara signifikan. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sangat bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan berupa penelantaran. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkapkan bahwa sepertiga perempuan di dunia, atau 30% perempuan, pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual baik oleh pasangan mereka atau kekerasan seksual non-pasangan atau keduanya. Satu dari empat wanita berusia 15-49 tahun yang telah menjalin hubungan telah mengalami

¹ Asteria Putri Budylianti, "Aktivitas Komunitas Khonghucu di Kelenteng Hwie Ing Kiong Kota Madiun", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016, hlm. 1.

kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan mereka setidaknya sekali dalam seumur hidup mereka. Riset WHO secara global menyebut sebanyak 38% dari semua pembunuhan perempuan dilakukan oleh pasangan sendiri. Di luar itu 6% perempuan di seluruh dunia melaporkan telah diserang secara seksual oleh orang lain yang bukan suami atau pasangan mereka.²

Di Indonesia, berdasarkan data yang dicatat dari Komnas Perempuan mengenai banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2022 terhitung mencapai 457.895 laporan. Dari total tersebut, sebanyak 339.782 merupakan kekerasan berbasis gender, yang diajukan kepada Komnas Perempuan sejumlah 3.442 kasus. Menurut KemenPPPA Republik Indonesia terdapat peningkatan angka kasus perilaku kekerasan kepada perempuan dan anak-anak di Indonesia seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Korban Kekerasan di Indonesia berdasarkan Kelompok Usia Periode Tahun 2019-2023

No	Usia Korban	2019	2020	2021	2022	2023*
1	0-5 Thn	994	1.019	1.262	2.029	1.505
2	6-12 Thn	2.501	2.566	3.176	5.653	4.376
3	13-17 Thn	5.071	5.202	6.439	9.961	7.636
4	18-24 Thn	2.244	2.302	2.850	3.726	2.502
5	25-44 Thn	5.277	5.413	6.700	6.895	4.783
6	45-59 Thn	959	984	1.218	1.248	883
7	>60 Thn	86	88	109	172	113
Jumlah		17.132	17.575	21.753	29.684	21.798

*sampai bulan November 2023

Sumber : Data diolah dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, 2023

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Satuan Reserse Kriminal Polres Blitar (selanjutnya disebut Unit PPA Satreskrim Polres Blitar) menjadi kekuatan penegak hukum yang tidak hanya memberikan perlindungan kepada anak-anak, termasuk yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perlindungan kepada perempuan yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Melalui kegiatan sosialisasi, unit ini aktif dalam mengatasi masalah sosial dan melaksanakan tugas pokok Polri sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dengan tekad untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pelayanan, dan dukungan kepada masyarakat, Unit PPA Satreskrim Polres Blitar berperan penting dalam menjalankan misi kemanusiaan. Polres Blitar telah giat melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini tergambar dari data pelanggaran yang ditangani oleh Unit PPA Satreskrim Polres Blitar dari tahun 2019 hingga bulan November 2023.

² WHO. 2021. Violence against women dalam (<https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/violence-against-women>), diakses tanggal 2 Desember 2023.

Tabel 2. Jenis Tindak Pidana yang Ditangani Unit PPA Polres Blitar

Tahun	Perlindungan Perempuan dan Anak		KDRT	
	Masuk	Selesai	Masuk	Selesai
2021	17	15	2	0
2022	15	10	10	6
2023*	25	18	5	2
Total	57	43	17	8

Sumber: Urmin Satreskrim Polres Blitar, 2023.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dibatasi dengan dua rumusan masalah, yaitu: Pertama, apa saja faktor kriminogen penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Blitar ? kedua, bagaimana upaya yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Unit PPA Satreskrim Polres Blitar ? dan ketiga, apasaja hambatan dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Unit PPA Satreskrim Polres Blitar ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research (*sosio legal research*) untuk mengetahui keadaan yang terjadi di dalam praktek. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala sosial tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta sosial tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan. Pada penulisan sosiologis atau empiris, maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai penulisan penelitian hukum untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³ Penelitian ini menggunakan jenis data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung. Selain itu penelitian ini juga menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor kriminogen penyebab tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak

Secara umum ruang lingkup kriminologi meliputi faktor-faktor penyebab kejahatan, gejala-gejala kejahatan, latar belakang kejahatan serta reaksi lembaga-lembaga sosial masyarakat yang dapat mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Untuk dapat mencegah lahirnya tindakan tersebut maka perlu adanya sebuah

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010, hlm. 52.

tindakan yang mengarah pada kebijaksanaan sosial sebagai suatu tindakan reaktif yang terstruktur dan terarah di dalam kehidupan masyarakat.⁴

Kondisi sosial dalam lingkungan masyarakat dan perkembangan zaman yang begitu cepat dapat mengakibatkan adanya konflik-konflik eksternal maupun internal di dalam masyarakat serta dalam pergaulan hidup individu dalam masyarakat. Terjadinya perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam suatu lingkungan masyarakat yang tidak diimbangi dengan perkembangan, pembinaan sosial di dalam pergaulan masyarakat justru akan mengakibatkan hal-hal yang sifatnya negatif. Hal tersebut menyebabkan corak berpikir masyarakat kadang tidak realistis dalam mengungkap dan memahami etika dalam tatanan hidup bermasyarakat sehingga membawa masyarakat untuk melakukan suatu tindakan yang di anggap menyalahi norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan kehidupan mereka, seperti melakukan kejahatan dan kekerasan.⁵

Kekerasan pada umumnya ditujukan kepada kelompok yang dianggap lemah, perempuan dan anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan tersebut.⁶ Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, *trafficking*, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial perempuan dan anak yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.⁷ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, menyatakan bahwa terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran, dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada negara berkembang, di mana pelanggaran norma dilatar belakangi oleh hal-hal tersebut.⁸

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di wilayah hukum Polres Blitar, ada berbagai macam faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu antara lain:

a. Faktor kesadaran hukum

Kesadaran hukum adalah keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya, yang muncul dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.⁹ Dari hasil wawancara terhadap responden di Polres Blitar, dijelaskan bahwa para korban kekerasan baik itu perempuan dan anak dikarenakan para pelaku kesadaran hukumnya masih sangat kurang, mereka para pelaku baru mengetahui kalau perbuatannya tersebut ternyata dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat

⁴ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984, hlm. 53.

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 8.

⁶ Widiyanti Ninik dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penegakannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 39.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, 62.

⁹ Febriyanti, N. H., & Aulawi, A, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik, 4 (1), 2021, hlm. 34.

Soekanto, bahwa ada empat unsur kesadaran hukum yaitu: 1) Pengetahuan tentang hukum, 2) Pengetahuan tentang isi hukum, 3) Sikap hukum, 4) Pola perilaku hukum.¹⁰ Hakikat kepatuhan hukum tersebut memiliki 3 faktor yang bisa membuat masyarakat mematuhi hukum antara lain: *Compliance* kepatuhan hukum yang disebabkan karena adanya sanksi, *Identification* kepatuhan hukum yang disebabkan karena mempertahankan hubungan, dan *Internalization* kepatuhan hukum dikarenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum.¹¹

b. Faktor budaya patriarki

Secara harfiah, patriarki berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat, di mana kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak.¹² Budaya patriarki dapat berdampak negatif bagi perempuan. Keyakinan ini, laki-laki kemudian dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Keadaan adanya penerimaan masyarakat bahwa posisi perempuan memang subordinat mengakibatkan laki-laki atau suami dengan mudah melakukan tindakan kekerasan terhadap istri juga dianggap ilegal untuk membuat perempuan tetap menjadi subordinat sekaligus sebagai bentuk penyelesaian saat terjadinya masalah antara suami istri. Berdasarkan hasil penelitian di Polres Blitar menunjukkan bahwa, sebagian laki-laki memilih untuk mengeskpresikan emosinya dalam bentuk kekerasan, sedangkan perempuan lebih ekspresif. Meskipun demikian, laki-laki dapat menjadi agen pemutus rantai kekerasan. Namun tidak sepenuhnya hal tersebut adalah tanggung jawab dari laki-laki. Melainkan, semua orang juga memiliki tanggung jawab untuk memutus rantai kekerasan yang berada dalam hubungan. Budaya patriarki juga merupakan sebuah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pengontrol utama baik di dalam rumah tangga maupun di luar lingkup rumah tangga.

c. Faktor ekonomi atau kemiskinan

Di wilayah Polres Blitar berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa, seorang perempuan atau sebagai istri (korban) tidak bekerja karena tidak diberi izin oleh suami sehingga hanya mengandalkan suami yang bekerja untuk menghidupi keluarga, akibatnya ketika istri meminta uang kepada suami, istri dimaki bahkan tidak urung dipukuli karena suami tidak sanggup memenuhi permintaan istri. Ada beberapa pasangan suami istri yang masih tinggal bersama mertua sehingga timbul ketidakmampuan dan ketidakberanian untuk mengelola keuangan karena masih bergantung pada mertua. Selain itu, dari observasi dilapangan menunjukkan bahwa kemiskinan sering dimaknai sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pakaian, papan, pendidikan, dan kesehatan. Indikator utama kemiskinan yaitu: makanan, pakaian dan tempat tinggal yang tidak layak atau masih kurang, terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif, kesejahteraan hidup masyarakat yang kurang, serta masih banyak masyarakat yang buta huruf dan terbatasnya layanan sanitasi dan layanan kesehatan.

Dari hasil penelitian di wilayah Polres Blitar, ditemukan bahwa para pelaku kekerasan kurangnya rasa tanggung jawab akan kebutuhan rumah tangga, tidak memberi

¹⁰ Soekanto, S., & Sulistyowati, B, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 24.

¹¹ Febriyanti, *Op. Cit*, hlm. 40.

¹² Sutiawati, S. dan Mappaselleng, N.F., *Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar*, Jurnal Wawasan Yuridika, 4 (1), 2020, hlm. 17-30.

nafkah pada istri, tidak mempunyai pekerjaan/ pengangguran. Hal ini dapat memicu terjadinya tindak kekerasan. Karena istri sering menuntut kebutuhannya terpenuhi. Penelitian lain juga mengatakan bahwa kemiskinan dapat memicu munculnya destabilisasi emosi pada pasangan suami-istri, kondisi seperti ini akan memudahkan terjadinya KDRT. Kebergantungan secara ekonomi oleh istri kepada suami juga memicu KDRT. Istri biasanya menerima begitu saja kekerasan yang dilakukan oleh suami dengan alasan takut tidak diberi uang untuk kebutuhan sehari-hari.¹³ Kemiskinan itu terjadi karena jika kehidupannya dibandingkan dengan kehidupan orang lain lebih rendah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan atau berlaku dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status ekonomi berhubungan dengan kekerasan, disebabkan sebagian besar perempuan menggantungkan ekonominya kepada suaminya sedangkan kondisi ekonomi suami yang tidak memiliki pekerjaan dan bekerja serabutan sehingga suami sendiri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal inilah yang memicu destabilisasi emosi antara suami-istri sehingga menimbulkan tindak kekerasan baik yang bersifat verbal maupun nonverbal seperti tindak pemukulan dan tindak kekerasan lainnya.

d. Faktor dugaan adanya perselingkuhan

Perselingkuhan dianggap sebagai tindakan yang dirasakan dan dialami sebagai penghianatan yang menyakitkan dari suatu kepercayaan dan ancaman dalam suatu hubungan.¹⁴ Perselingkuhan adalah kegiatan seksual atau emosional dalam bentuk ketidaksetiaan yang dilakukan oleh suami atau istri yang menjalani hubungan intim dengan orang lain dan melanggar komitmen atau kepercayaan antara keduanya.¹⁵ Dalam psikologi keluarga sering diasumsikan bahwa seorang pasangan pernikahan akan mengalami yang namanya pubertas kedua kalinya. Sehingga untuk mengatasi persoalan yang terjadi suami sering melakukan kekerasan terhadap istrinya untuk menutupi perselingkuhannya yang dilakukan oleh istrinya.¹⁶

Dalam catatan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Blitar, kasus KDRT itu terjadi pada Januari hingga awal Maret 2023. Rinciannya, empat kasus tergolong Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan satu kasus pengancaman penyebaran video pornografi oleh pacar. Selama awal tahun 2023 sudah ada lima kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Blitar, empat kasus merupakan KDRT satu lainnya ancaman penyebaran video pornografi. Di awal 2023 kasus kekerasan terhadap istri oleh suami masih mendominasi. Penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap istri adalah perselingkuhan serta faktor ekonomi.¹⁷

Tindakan perselingkuhan merupakan sebuah kegiatan seksual atau emosional dalam bentuk ketidaksetiaan yang dilakukan baik oleh suami maupun istri. Perselingkuhan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Purba, A.T.D.B. dan Kusumiati, R.Y., *Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Forgiveness pada Remaja yang Putus Cinta Akibat Perselingkuhan*, Psikologi Konseling, 14(1), 2019, hlm. 57.

¹⁵ Adam, A., *Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik Istri*. AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, 14(2), 2020, hlm. 177-186.

¹⁶ Asfiyak, K., *Menelisik Akar Penyebab Kekerasan Gender Pada Masyarakat Petani Peladang Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS), 3(1), 2021, hlm. 71-93.

¹⁷ Winanto, <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/lima-perempuan-di-blitar-jadi-korban-kekerasan-di-awal-2023/> diakses tanggal 2 desember 2023.

terjadi karena timbulnya rasa ketidakpuasan dalam pernikahan, seksualitas dan kebutuhan untuk mencari kebebasan. Jika dibandingkan dengan kondisi yang ada pada responden banyak dari responden yang mengalami tindak kekerasan namun tidak pernah diselingkuhi oleh suaminya. Hasil wawancara dengan responden, didapat hasil jika banyak dari responden mengatakan tidak mengalami tindak kekerasan akibat adanya perselingkuhan. Responden mengatakan jika dirinya mendapat tindak kekerasan akibat adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan kepala dingin sehingga suami merasa emosi dan melakukan suatu tindak kekerasan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dinyatakan, jika perselingkuhan terjadi akibat ada rasa ketidakpuasan terhadap pasangannya sendiri dan mencari kepuasan diluar. Dan ketika tindakan perselingkuhan diketahui oleh pasangan kebanyakan yang melakukan tindakan perselingkuhan akan melakukan suatu tindak kekerasan guna menutupi tindakan perselingkuhan yang dijalaninya.

e. Faktor pernikahan dini

Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda. Umur yang relatif muda yang dimaksud tersebut adalah usia pubertas yaitu usia antara 10-19 tahun.¹⁸ Menurut revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan keputusan MK yang terbit awal September 2019 tentang Perkawinan, usia minimum dalam menikah bagi laki-laki maupun perempuan menjadi 19 tahun, dari yang sebelumnya yaitu 16 tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹⁹

Permohonan pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, cukup banyak. Hingga Mei 2023, tercatat ada 108 permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Blitar Hakam Indoro mengatakan pengajuan asesmen untuk dispensasi pernikahan anak memang ada 108 pemohon hingga Mei 2023. Dari jumlah 108 pemohon itu, rentang usia antara 13-18 tahun. Bahkan, 30 persen di antaranya usianya 13-16 tahun. Jumlah ini juga tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu. Sepanjang 2022, ada 168 pengajuan permohonan dispensasi pernikahan. Untuk tahun 2023 ini, masih di Mei 2023 sudah ada 108 permohonan.²⁰

Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini secara garis besar ada tiga yaitu dari segi psikologis seperti merasa malu, takut, stress dan terbebani. Selanjutnya dampak ke dua yaitu dari segi kesehatan meliputi melahirkan bayi premature, perdarahan dan darah tinggi, terakhir dampak sosial ekonomi yakni mereka kurang bersosialisasi dengan lingkungan setempat dan merasa malu dikarenakan menikah di usia dini karena hamil di luar nikah. Dari

¹⁸ Desiyanti, I.W., Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. Jikmu, 5(3), 2015, hlm. 67.

¹⁹ Rahyu, S.S. and Palupi, M.A., Manajemen Konflik, Komunikasi Keluarga, Pernikahan Dini, Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021, hlm. 123.

²⁰ Didik Fibrianto, <https://www.beritasatu.com/nusantara/1048194/108-anak-di-bawah-umur-di-blitar-ajukan-pernikahan-dini>, diakses tanggal 2 Desember 2023.

segi ekonomi belum mandiri dan masih bergantung kepada orang tua.²¹ Pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat sangat mempengaruhi sebuah tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat juga.

Pernikahan dini dikatakan berkaitan dengan kekerasan karena di usia dini untuk menikah banyak dari pasangan dari segi emosi masih labil dan belum bisa mengontrol, sehingga sesuai dengan kondisi responden dimana responden yang menjalani pernikahan di usia muda lebih rentan untuk bertikai dengan pasangannya dan dengan kondisi dimana emosi belum stabil sehingga suami tanpa sadar melakukan sebuah tindak kekerasan terhadap dirinya, menikah di umur 18 tahun dengan kondisi sudah hamil duluan sehingga memutuskan untuk menikah guna menutupi aib keluarga, menikah di umur yang masih muda pola pikir belum dewasa, pola pikir belum stabil, menikah di usia muda sama dengan melepas masa muda untuk bermain-main sehingga terkadang setelah menikah pasangan merasa bosan hanya mengurus rumah tangga saja dan responden juga mengatakan awalnya mereka tidak menyangka jika pernikahan yang dimiliki akan menimbulkan dampak negatif untuk dirinya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka bisa ditarik kesimpulan, menikah di usia muda juga menimbulkan dampak-dampak negatif seperti dampak dari segi psikologis, dampak dari segi kesehatan dan dampak dari segi sosial ekonomi. Di usia yang masih muda dalam membina rumah tangga tentu sangat rentan dengan suatu tindak kekerasan dimana suami maupun istri masing-masing belum mampu mengontrol emosi, sehingga hal ini dapat memicu suatu tindak kekerasan. Maka dari itu tindak kekerasan fisik lebih mendominasi jenis-jenis tindak kekerasan yang ada.

2. Penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Unit PPA Satreskrim Polres Blitar

Pelanggaran hukum di wilayah hukum Polres Blitar didominasi oleh tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak, hal ini terlihat dari data pelanggaran hukum yang dilanggar oleh para pelaku terlapor di Unit PPA Satreskrim Polres Blitar dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Pelanggaran Terkait Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Polres Blitar Periode Tahun 2023

Aturan Hukum yang Dilanggar		Pidana	Jumlah Pelanggaran
Pasal	Aturan Hukum		
44 (1) (2)	UU No. 23 Tahun	KDRT fisik	4
46 (1)	2004 tentang	KDRT psikis	1
9 (1) jo 49 (a)	PKDRT	Penelantaran	

²¹ Maudina, L.D., Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 15(2), 2019, hlm. 89-95.

81 dan 82 (1) (2)	UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang	Pencabulan anak	10
76 (d) <i>jo</i> 81 dan/atau 83 (1) <i>jo</i> 76 (e)	UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pencabulan anak	8
76 (c) <i>jo</i> 80		Menempatkan, membiarkan, menyuruh, turut serta melakukan kekerasan terhadap anak	1
170	KUHP	Pengeroyokan	1
363		Pencurian	1
332		Melarikan seorang Wanita yang belum cukup umur	1
285		Percobaan perkosaan	1

Sumber: Unit PPA Satreskrim Polres Blitar, 2023.

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Polres Blitar yang ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Blitar yakni (1) kasus pencabulan anak di bawah umur pada tanggal 03 Oktober 2023. Korban yakni CA berusia 15 tahun. Pelaku yakni Cian Wijaya berusia 19 tahun; (2) kasus pencabulan anak di bawah umur pada tanggal 21 Oktober 2023. Korban yakni SE berusia 14 tahun. Pelaku yakni Hadi Suwino berusia 23 tahun; (3) kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 06 November 2023. Korban yakni SJ berusia 25 tahun. Pelaku yakni Santoso berusia 73 tahun. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kasus melibatkan rendahnya kesadaran hukum, budaya patriarki, kondisi ekonomi yang kurang baik atau tingkat kemiskinan, dugaan perselingkuhan, dan praktik pernikahan dini.

Menurut data yang diperoleh dari Unit PPA Polres Blitar dari tahun 2019 sampai dengan September 2023 terdapat 113 kasus yang menimpa perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut terdapat 92 kasus yang masuk dalam Pidana Perlindungan Anak, 21 kasus lainnya merupakan KDRT. Dari 92 kasus Pidana Perlindungan Anak tercatat 76 kasus terselesaikan, sementara untuk laporan KDRT tercatat ada 11 kasus dari 21 kasus yang selesai.

Dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, haruslah juga berdasar pada peraturan

yang ada, namun dalam beberapa kasus jalur hukum bukanlah satu-satunya jalan keluar agar mendapat kepastian hukum. Oleh karena hal inilah dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, berdasarkan hasil penelitian, bahwa pihak Polres Blitar menggunakan dua alternatif penyelesaian. Dua alternatif upaya yang digunakan ialah pendekatan penal dan non penal.²² Dalam penanganan tindak pidana terhadap perempuan dan anak, Unit PPA Satreskrim Polres Blitar, melaksanakan:

a. Upaya non penal

Upaya nonpenal lebih diutamakan pada upaya preventif. Yang merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Upaya preventif terhadap kekerasan pada perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Blitar dilakukan oleh Polres Blitar. Upaya-upaya tersebut diantaranya ialah dengan pembinaan masyarakat. Pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ialah melalui Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) yang berada di setiap tingkat kepolisian baik itu Polres maupun Polsek. Sat Binmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polisi masyarakat (Polmas) dan kerja sama dengan instansi pemerintah/lembaga/organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan kemandirian dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri dan masyarakat. Secara konkret upaya yang dilakukan Sat Binmas ialah dengan melakukan penyuluhan ke masyarakat hingga lingkup terkecilnya yakni di tingkat RT/RW. Selain itu upaya penyuluhan juga dilakukan ke sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA. Program penyuluhan dan pemberian edukasi ke masyarakat ini telah dilakukan bersama-sama dengan instansi lain, yaitu Pusat Pemberdayaan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), Dinas Sosial maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sat Binmas juga menjembatani masyarakat yang tertutup dan cenderung melakukan penolakan terhadap masuknya unsur-unsur pemerintah seperti dari P2TP2A atau Dinas Sosial. Dengan bantuan dari Sat Binmas ini pihak P2TP2A atau Dinas Sosial biasanya dapat dengan lebih mudah untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam rangka melakukan sosialisasi yang dibutuhkan. Upaya pembinaan masyarakat selain dilakukan oleh pihak Kepolisian juga dilakukan oleh pihak P2TP2A Kabupaten Blitar.

Tahap pencegahan dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan juga pemantauan. Untuk lingkup rumah tangga terkecil di lingkungan Rukun Warga (RW) dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) dan Pos Pelayanan Terpadu (PPT) yang berada di tingkat Kelurahan sebagai garda terdepan dalam memantau perilaku-perilaku yang menyimpang di masyarakat, termasuk di dalamnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Satgas dan PPT juga melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan terjadinya perilaku-perilaku menyimpang masyarakat. Satgas dan PPT ini juga berfungsi sebagai respon cepat manakala terjadi suatu perbuatan yang menyimpang di masyarakat terkait dengan permasalahan perempuan dan anak. Satgas dan PPT akan melakukan penanganan sendiri atau jika sudah sangat mendesak akan melaporkannya kepada P2TP2A.

Upaya lainnya adalah dengan pendekatan terhadap masyarakat. Pendekatan ini diterapkan mengingat salah satu penyebab tingginya angka tindak pidana kekerasan

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 158.

terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Blitar adalah adanya faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, sosial, rendahnya tingkat sumber daya manusia (SDM), serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kurangnya pemahaman dan edukasi di kalangan masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pendekatan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial, diharapkan masyarakat dapat teredukasi dan menyampaikan pesan untuk dapat terhindar dari tindak pidana kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak. Apabila hal tersebut terlaksana dengan baik maka masyarakat dapat membantu pihak kepolisian menyampaikan pesan secara tidak langsung menjadi himbauan.

b. Upaya Penal

Pendekatan Penal ialah penerapan hukum pidana atau *criminal law application* yakni jika korbannya perempuan atau anak maka ada prosedur penanganan sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana dan tindakan atau dengan kata lain ini ialah upaya pendekatan secara represif. Maka dapat diartikan pendekatan penal yang dimaksud ialah penjatuhan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani Unit PPA Polres Blitar telah dilaksanakan dengan baik, dengan menjalankan manajemen penanganan perkara pidana. Berdasarkan data yang diperoleh dari kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada tahun 2022 sebanyak 17 kasus dapat diselesaikan semua, dan sepanjang tahun 2023 hingga bulan September dari 21 kasus yang masuk, sudah 18 kasus yang telah diselesaikan Unit PPA.

Adapun prosedur dan tata cara kerja pelaksanaan penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dilaksanakan oleh Unit PPA Polres Blitar dengan berpedoman pada UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Prosedur penanganan yang telah dilaksanakan adalah : 1) Menerima laporan, 2) Penyelidikan, 3) Dimulainya penyidikan 4) Upaya paksa (pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat), 5) Penetapan tersangka, 6) Melakukan penahanan, 7) Pemberkasan, 8) Penyerahan berkas perkara, 9) Penyerahan tersangka dan barang bukti serta 10) Penghentian penyidikan jika tidak memenuhi unsur tindak pidana, batal demi hukum, pelaku meninggal dunia dan telah dilakukan *restorative justice*.

Kegiatan yang dilakukan Unit PPA Satreksrim Polres Blitar dalam rangka meningkatkan kinerja penyidik dalam menangani kasus tindak pidana perempuan dan anak, adalah :

- 1) Bekerjasama dengan semua instansi terkait dan membentuk satuan tugas PPA di setiap kecamatan di Kabupaten Blitar.
- 2) Pembentukan Satgas PPA yang terdiri dari :
 - a) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Blitar terlibat dalam memberikan pendampingan psikologis kepada perempuan dan anak sebagai bagian dari tugasnya.

- b) Dinas Sosial dilibatkan dalam pendampingan korban anak dan tersangka anak dalam urusan diversi,
 - c) Badan Pemasarakatan (Bapas) dilibatkan dalam penelitian tersangka anak serta pendampingan diversi,
- 3) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang merupakan salah satu peran dan tanggung jawab dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Blitar. Tugas ini mencakup seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari langkah-langkah pencegahan, identifikasi, penerimaan pengaduan, penanganan kasus, hingga proses pemulihan korban. Hal ini berguna untuk meningkatkan kinerja penyidik dalam menangani kasus kekerasan, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Blitar mengambil langkah dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.
- 4) Pengawasan dan pengendalian penanganan tindak pidana
Pengawasan dilaksanakan oleh Satuan Reserse Kriminal di bawah pimpinan Kasat Reskrim yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolres dan berada di bawah kendali Wakapolres. Unit PPA, yang mengawasi tugas personel, juga termasuk dalam kewenangan Satuan Reserse Kriminal. Setiap pelaksanaan kegiatan selesai, perlu dilakukan pemantauan, evaluasi dan juga membuat perbaikan, termasuk pelaksanaan penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak di Polres Blitar, hal tersebut juga dapat membangun kerjasama dan rasa soliditas di Satreskrim Polres Blitar. Selain itu, tujuan selalu dilaksanakannya anev baik mingguan, bulanan, dan tahunan yaitu agar pimpinan maupun para anggota dapat saling mengetahui kesulitan yang dialami satu sama lain. Melakukan kontrol terhadap Unit PPA Satreskrim Polres Blitar. Jika memang ada ketidakseimbangan antara jumlah kasus yang ditangani dengan jumlah personel yang ada, maka akan ditinjau terlebih dahulu apakah memang disebabkan oleh SDM yang kurang atau jumlah SDM cukup tetapi belum memadai dalam hal keterampilan dan kecakapan saat menjalani tugas. Adapun hal yang dilakukan yaitu memaksimalkan SDM yang ada dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti kursus atau pendidikan dan pelatihan terkait penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak.
- 3. Hambatan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Unit PPA Satreskrim Polres Blitar**
- Hambatan yang dihadapi dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Unit PPA Satreskrim Polres Blitar antara lain:
- a. Hambatan internal
 - 1) Sumberdaya Unit PPA terutama penyidiknya masih terbatas jumlah dan kemampuannya. Unit PPA Polres Blitar hanya diperkuat oleh 1 (satu) orang Pejabat Sementara Kanit berpangkat AIPU dan 5 (lima) orang anggota berpangkat Brigadir. Jika dihadapkan dengan Perkap Nomor 10 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau Unit PPA, maka adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan jumlah personel semestinya yaitu sebanyak 2 (dua) anggota berpangkat Bintara. Dari ke enam personel Unit PPA Polres Blitar belum ada yang melaksanakan Prolat untuk meningkatkan

kompetensi dan keterampilannya dalam bidang penanganan anak dan perempuan baik sebagai korban maupun tersangka.

- 2) Keterbatasan sarana prasarana. Berkaitan dengan sarana prasarana pada Unit PPA Satreskrim Polres Blitar ialah belum tersedianya laptop maupun komputer untuk menunjang kinerja para penyidik, para anggota harus menggunakan laptop pribadi untuk melaksanakan tugasnya. Selain itu, Unit PPA Polres Blitar belum memiliki boneka peraga/manakim yang seharusnya dapat menjadi alat penunjang dalam mendampingi kasus kekerasan yang dialami oleh anak. Kemudian hambatan yang dialami berkaitan dengan letak geografis wilayah Kabupaten Blitar, membutuhkan sarana mobilitas yang sesuai untuk turun ke lapangan yang cukup sulit dijangkau untuk wilayah dataran tinggi dan pantai. Dalam menunjang kinerja penyidik unit PPA Satreskrim Blitar.
 - 3) Dalam proses penyidikan, korban kurang terbuka dalam memberikan keterangan pada penyidik sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam menentukan langkah apa yang dapat diambil serta kesulitan dalam menentukan bentuk kekerasan serta pasal yang dapat diterapkan pada pelaku.
 - 4) Dalam proses penyidikan, pihak penyidik seringkali menghadapi kendala dalam hal alat bukti terutama untuk kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga.
- b. Hambatan eksternal
- 1) Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa membuka permasalahan keluarga sama artinya dengan membuka aib keluarga, hal tersebut akan menjadikan keluarga dijauhi dan dikucilkan masyarakat
 - 2) Budaya patrilineal yang menganggap perempuan harus tunduk pada laki-laki dalam hal ini seorang istri harus tunduk dan patuh pada suami mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar terjadi dalam kehidupan keluarga, dengan alasan untuk mendidik, kekerasan itupun dilegalkan oleh budaya.
 - 3) Budaya masyarakat yang mudah memaafkan memang sangat baik untuk kehidupan bermasyarakat, namun dalam hal KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidaklah dapat dikatakan bahwa budaya mudah memaafkan dari masyarakat menyelesaikan semua masalah.

KESIMPULAN

Faktor-faktor kriminogen terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: a. Faktor kesadaran hukum, b. Faktor ekonomi dan kemiskinan, c. Faktor budaya patriarki, d. Faktor adanya dugaan perselingkuhan dan e. faktor pernikahan dini.

Untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Unit PPA Satreskrim Polres Blitar dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan non penal dan pendekatan penal. Pendekatan non penal berupa upaya preventif/ pencegahan, pengurangan, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang bekerjasama dengan P2TP2A, Dinas Sosial, KPAI, Satgas pelayanan terpadu dari desa sampai dengan kecamatan di wilayah Kabupaten Blitar. Sedangkan upaya penal,

dengan menggunakan pendekatan hukum untuk menindak pelakunya sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan, agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Adapun hambatan yang dialami dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Unit PPA Satreskrim Polres Blitar yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal antara lain: keterbatasan jumlah penyidik dan kemampuan bidang penyidikan, keterbatasan sarana dan prasarana penyidikan, kurangnya kooperatif para pelaku untuk mengungkap perkara tersebut dan kurangnya alat bukti untuk menjerat tersangka. Hambatan eksternalnya adalah pelaku kurang kooperatif dalam mengungkap tindak pidana, budaya patrialinial yang masih kuat di tengah masyarakat dan budaya masyarakat yang mudah memaafkan pelaku sehingga pelaku tidak jera.

SARAN

Bagi penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Blitar untuk lebih meningkatkan pelayanan serta kinerjanya dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan memberikan dukungan kepada pelapor atau korban. Perlunya untuk meningkatkan kerja sama dengan stakeholder dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak baik secara penal maupun nonpenal. Masyarakat harus mendukung penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar pelaku menjadi jera.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, A., 2020, Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik Istri. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 14(2).
- [2] Asfiyak, K., 2021, Menelisik Akar Penyebab Kekerasan Gender Pada Masyarakat Petani Peladang Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 3(1).
- [3] Asteria Putri Budylanti, 2016, *Aktivitas Komunitas Khonghucu di Kelenteng Hwie Ing Kiong Kota Madiun*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- [4] Desiyanti, I.W., 2015, Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(3).
- [5] Didik Fibrianto, <https://www.beritasatu.com/nusantara/1048194/108-anak-di-bawah-umur-di-blitar-ajukan-pernikahan-dini>, diakses tanggal 2 Desember 2023.
- [6] Febriyanti, N. H., & Aulawi, A, 2021, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4 (1).
- [7] Maudina, L.D., 2019, Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2).
- [8] Purba, A.T.D.B. dan Kusumiati, R.Y., 2019, Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Forgiveness pada Remaja yang Putus Cinta Akibat Perselingkuhan, *Psikologi Konseling*, 14(1).
- [9] Rahyu, S.S. and Palupi, M.A., 2021, *Manajemen Konflik, Komunikasi Keluarga, Pernikahan Dini*, Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [10] Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- [11] Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia

Pres.

- [12] Soekanto, S., & Sulistyowati, B, 2017, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers.
- [13] Sutiawati, S. dan Mappaselleng, N.F., 2020, Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, Jurnal Wawasan Yuridika, 4 (1).
- [14] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [15] Widiyanti Ninik dan Yulius Waskita, 1987, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penegakannya, Jakarta: Bina Aksara.
- [16] Winanto, <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/lima-perempuan-di-blitar-jadi-korban-kekerasan-di-awal-2023/> diakses tanggal 2 desember 2023.
- [17] WHO. 2021. Violence against women dalam (<https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/violence-against-women>), diakses tanggal 2 Desember 2023.